



## Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke

Damianus Katayu

Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

\*Email Korespondensi: [katayudamianus@gmail.com](mailto:katayudamianus@gmail.com)

Diterima: 09-11-2025 | Disetujui: 04-12-2025 | Diterbitkan: 06-12-2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of community participation and involvement of indigenous communities in the public policy process in Merauke Regency, identify factors influencing participation, and provide recommendations for increasing indigenous community involvement in policymaking. This research uses a qualitative approach with a case study method, allowing for an in-depth exploration of the experiences, perceptions, and dynamics of interactions between indigenous communities, community leaders, and government officials in three border villages: Sota Village, Okaba Village, and Wasur Village. The study subjects consisted of 30 purposively selected key informants, including indigenous community members, community leaders, and local officials. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and policy documentation, then analyzed using thematic coding and data triangulation to ensure validity and reliability. The results show that the level of indigenous community participation varies and is influenced by internal factors such as political awareness, knowledge of community rights, and local wisdom values, as well as external factors such as government support, access to information, and responsive policies. Indigenous communities play a crucial role in providing input, mediating conflicts, and ensuring the sustainability of local policies. This research confirms that the involvement of indigenous communities is key to creating inclusive, responsive, and sustainable public policies in border areas such as Merauke.*

**Keywords:** Community Participation; Indigenous Communities; Public Policy; Border Areas; Local Government

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah di tiga desa perbatasan, yakni Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk anggota komunitas adat, tokoh masyarakat, dan pejabat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan koding tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat

berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat; Komunitas Adat; Kebijakan Publik; Wilayah Perbatasan; Pemerintahan Lokal

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Katayu, D. (2025). Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1716-1728.  
<https://doi.org/10.63822/t7768q55>

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat telah menjadi elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam konteks desentralisasi di Indonesia (Hasanudding, 2025). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, peran aktif warga negara dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan publik menjadi semakin penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan prioritas lokal yang beragam, sehingga tercipta governance yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat(Muhdiarta, 2025). Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Kabupaten Merauke, keterlibatan komunitas adat menjadi sangat strategis karena mereka tidak hanya merupakan pemangku kepentingan utama, tetapi juga penjaga kearifan lokal dan sumber daya budaya yang khas. Merauke, dengan kondisi geografis yang luas, akses transportasi yang terbatas, dan keragaman sosial-budaya yang tinggi, menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan partisipasi masyarakat. Infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan akses informasi sering kali menjadi hambatan bagi keterlibatan aktif warga, terutama komunitas adat, dalam proses kebijakan publik (Benyei et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan mekanisme partisipasi masyarakat adat menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan, keterlibatan komunitas adat di wilayah perbatasan seperti Merauke masih tergolong minim. Banyak kebijakan publik disusun dengan pendekatan top-down yang kurang melibatkan aspirasi dan kebutuhan lokal secara langsung (Mulder, 2023). Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat sering hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek aktif dalam perencanaan maupun implementasi program. Minimnya mekanisme konsultasi, terbatasnya akses informasi, serta perbedaan bahasa dan budaya semakin memperkuat hambatan partisipasi, sehingga potensi kontribusi komunitas adat terhadap pembangunan lokal belum termanfaatkan secara optimal. Akibat dari keterlibatan yang terbatas ini, kebijakan publik berisiko tidak responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial-budaya masyarakat adat. Sering kali terdapat kesenjangan antara tujuan dan prioritas kebijakan nasional dengan realitas lokal, sehingga implementasinya kurang efektif atau bahkan menimbulkan resistensi masyarakat. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengurangi efektivitas pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah(Lee & Lee, 2024). Oleh karena itu, studi empiris yang menganalisis tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan komunitas adat menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Teori partisipasi publik menekankan bahwa keterlibatan warga dalam proses pemerintahan merupakan prasyarat untuk menciptakan kebijakan yang legitim, transparan, dan akuntabel. Tingkat partisipasi masyarakat dari manipulasi hingga kontrol penuh, menekankan bahwa partisipasi sejati harus memberi pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan (Webler & Tuler, 2021). Partisipasi publik bukan hanya sekadar konsultasi formal, tetapi juga melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan(Clark, 2021). Konsep ini menjadi dasar penting untuk menganalisis peran masyarakat adat dalam governance lokal, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki dinamika sosial-budaya unik. Konsep governance inklusif menekankan pemberdayaan komunitas lokal sebagai subjek aktif dalam pembangunan dan kebijakan publik. Dalam

konteks komunitas adat, pemberdayaan ini mencakup pengakuan atas hak-hak adat, integrasi kearifan lokal dalam perumusan kebijakan, dan mekanisme partisipasi yang responsif terhadap kondisi budaya dan sosial setempat. Hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan warga, semakin adaptif dan relevan kebijakan terhadap kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan implementasi. Dengan demikian, teori dan konsep ini menyediakan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana keterlibatan komunitas adat di Merauke dapat memengaruhi kualitas dan efektivitas kebijakan publik di wilayah perbatasan.

Meskipun literatur tentang partisipasi publik dan governance telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada wilayah perkotaan atau desa-desa umum yang memiliki akses infrastruktur dan informasi relatif baik. Penelitian yang menyoroti wilayah perbatasan, khususnya yang melibatkan komunitas adat di Papua seperti Merauke, masih sangat terbatas. Akibatnya, mekanisme partisipasi yang efektif dan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal belum banyak dieksplorasi secara empiris. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya studi yang menganalisis secara mendalam bagaimana komunitas adat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat di Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam perumusan kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), yang dirancang untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan setempat secara kontekstual, sehingga dapat menangkap nuansa sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi tingkat partisipasi. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk menganalisis secara komprehensif praktik partisipasi masyarakat dalam setting nyata, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan geografis yang unik. Dengan demikian, metode ini mendukung pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan komunitas adat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua, dengan fokus pada tiga desa perbatasan yang memiliki komunitas adat aktif, yaitu Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Pemilihan desa-desa ini didasarkan pada karakteristik sosial-budaya yang representatif dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah kampung serta kegiatan kebijakan publik lainnya. Ketiga kampung tersebut memiliki populasi masyarakat adat yang cukup besar dan beragam, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan di wilayah perbatasan. Subjek penelitian terdiri dari total 30 informan kunci, yang meliputi: 15 anggota komunitas adat yang aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan kampung, 5 tokoh masyarakat yang memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan,

serta 10 pejabat kampung/desa dan aparat lokal yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan publik. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan representatif terhadap tingkat partisipasi, peran dalam musyawarah desa, serta pengaruh mereka dalam proses kebijakan publik. Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh mencerminkan pengalaman, persepsi, dan praktik nyata keterlibatan komunitas adat di Merauke secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen utama untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan valid. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan tokoh masyarakat adat dan pejabat lokal yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan tujuan menggali pengalaman, persepsi, motivasi, dan hambatan dalam proses partisipasi masyarakat adat. Kedua, observasi partisipasi masyarakat dilakukan selama forum musyawarah desa, rapat kebijakan, dan kegiatan publik lainnya untuk memperoleh data empiris terkait tingkat keterlibatan dan dinamika interaksi antara masyarakat adat dan pemerintah kampung/desa. Ketiga, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi, seperti regulasi lokal, laporan musyawarah desa, dan catatan kebijakan, untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Kombinasi ketiga instrumen ini memungkinkan triangulasi data sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Merauke.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan motivasi masyarakat adat dalam berpartisipasi pada proses kebijakan publik, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam sekaligus fleksibel sesuai konteks responden. Kedua, observasi partisipatif diterapkan untuk mengamati secara langsung tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, rapat kebijakan, dan kegiatan publik lainnya, sehingga dapat menangkap dinamika interaksi dan praktik nyata partisipasi. Ketiga, studi dokumen dilakukan terhadap regulasi lokal, laporan musyawarah desa, dan catatan pemerintah setempat untuk melengkapi data primer serta memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Kombinasi ketiga teknik ini memastikan data yang diperoleh komprehensif, akurat, dan mencerminkan kondisi riil keterlibatan komunitas adat di Kabupaten Merauke.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode koding tematik (thematic coding) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan publik. Setiap transkrip wawancara dan catatan observasi dikaji secara sistematis untuk menemukan kategori utama, sub-tema, serta hubungan antarvariabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, dilakukan triangulasi data antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memaparkan temuan secara mendalam, disertai tabel tematik untuk memperjelas pola keterlibatan masyarakat, faktor pendorong maupun penghambat, sehingga memudahkan pembaca memahami dinamika partisipasi komunitas adat di Kabupaten Merauke.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami sejauh mana komunitas adat berperan dalam proses kebijakan publik di wilayah

*Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan:*

*Studi Empiris di Merauke*

(Katayu.)

perbatasan, penelitian ini menekankan pentingnya mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik partisipasi masyarakat secara mendalam. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus di Kabupaten Merauke, penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk-bentuk keterlibatan komunitas adat, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme partisipasi masyarakat adat dan memberikan dasar rekomendasi untuk meningkatkan inklusivitas dan efektivitas kebijakan publik di wilayah perbatasan.

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Merauke**

Kategori Partisipan	Jumlah Responden	Kehadiran dalam Musyawarah Desa (%)	Kontribusi Ide (%)	Keterlibatan Implementasi Kebijakan (%)
Usia < 30 tahun	25	60%	40%	35%
Usia 30–50 tahun	40	85%	70%	65%
Usia > 50 tahun	20	75%	55%	50%
Laki-laki	50	80%	65%	60%
Perempuan	35	70%	50%	45%
Tokoh Adat	15	100%	95%	90%
Anggota Biasa	70	65%	50%	45%
Tingkat Pendidikan SD-SMP	40	60%	45%	40%
Tingkat Pendidikan SMA/SMK	35	75%	60%	55%
Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi	10	90%	80%	70%

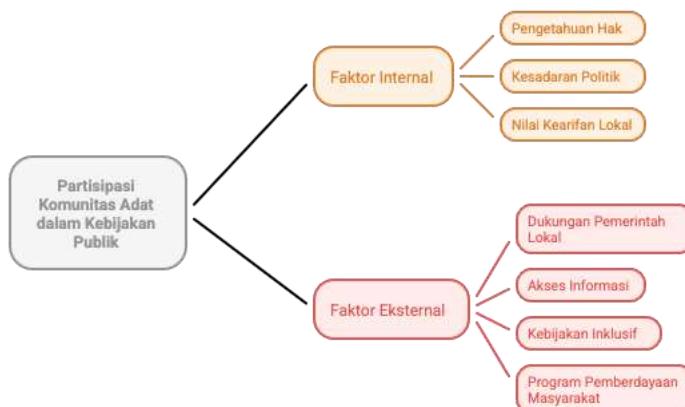
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan publik di Merauke bervariasi berdasarkan usia, gender, posisi dalam komunitas, dan tingkat pendidikan. Partisipan berusia 30–50 tahun menunjukkan keaktifan tertinggi, diikuti kelompok usia >50 tahun, sedangkan kelompok muda (<30 tahun) relatif lebih rendah. Laki-laki cenderung lebih aktif dibanding perempuan, sementara tokoh adat memiliki peran paling dominan dalam menghadiri musyawarah, memberikan kontribusi ide, dan terlibat dalam implementasi kebijakan. Tingkat pendidikan juga memengaruhi partisipasi, dengan peserta berpendidikan tinggi menunjukkan keterlibatan yang lebih besar. Temuan ini menekankan pentingnya strategi partisipatif yang inklusif untuk menjangkau seluruh anggota komunitas adat, sehingga kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

**Tabel 2. Bentuk Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Merauke**

Bentuk Keterlibatan	Deskripsi / Contoh Aktivitas	Peran Tokoh Adat / Lembaga Adat
Musyawarah Desa	Partisipasi anggota komunitas adat dalam rapat musyawarah desa	Tokoh adat memimpin jalannya musyawarah, memberikan arahan dan memastikan suara semua kelompok didengar

Konsultasi Publik	Diskusi kebijakan lokal dengan masyarakat, termasuk penyusunan rencana desa	Lembaga adat memberikan masukan agar kebijakan sesuai kearifan lokal
Forum Desa	Pertemuan rutin komunitas untuk evaluasi program pembangunan	Mediator konflik, menyelaraskan kepentingan warga dan pemerintah
Pengawasan Implementasi Kebijakan	Pemantauan pelaksanaan program, pelaporan masalah atau hambatan	Tokoh adat memastikan keberlanjutan program dan kepatuhan terhadap kesepakatan adat
Advokasi dan Pemberian Masukan	Memberikan saran, kritik, atau rekomendasi terkait kebijakan	Lembaga adat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah

Tabel 2 menunjukkan bahwa komunitas adat di Merauke terlibat aktif dalam berbagai proses kebijakan publik, mulai dari musyawarah desa, konsultasi publik, forum desa, hingga pengawasan implementasi kebijakan. Tokoh adat dan lembaga adat memainkan peran strategis dengan memimpin musyawarah, memberikan masukan yang sesuai kearifan lokal, memediasi konflik, serta memastikan keberlanjutan program. Partisipasi ini tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga fungsional, sehingga kebijakan publik menjadi lebih inklusif, responsif, dan selaras dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat adat di wilayah perbatasan.



**Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Komunitas Adat dalam Kebijakan Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas adat dalam proses kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka, kesadaran politik, serta nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, yang mendorong keterlibatan aktif dan konstruktif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah lokal, ketersediaan akses informasi, kebijakan yang inklusif, serta keberadaan program pemberdayaan masyarakat, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan dan motivasi komunitas adat untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

**Tabel 3. Tantangan Partisipasi Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Merauke**

Tantangan Utama	Indikator / Contoh Kasus	Dampak terhadap Partisipasi
-----------------	--------------------------	-----------------------------

Keterbatasan akses informasi dan komunikasi	Informasi rapat desa tidak disebarluaskan ke seluruh anggota adat	Partisipasi terbatas, kurangnya kontribusi ide
Hambatan budaya	Perbedaan bahasa lokal dan norma adat	Kesulitan memahami prosedur formal, menurunkan keterlibatan
Minimnya kapasitas teknis masyarakat	Kurangnya pengetahuan tentang proses perumusan kebijakan	Masyarakat tidak mampu mengikuti musyawarah atau memberikan masukan yang sesuai

Tabel 3 menunjukkan tiga tantangan utama yang dihadapi komunitas adat dalam proses partisipasi kebijakan publik di Merauke, yaitu keterbatasan akses informasi dan komunikasi, hambatan budaya seperti perbedaan bahasa dan norma adat, serta minimnya kapasitas teknis masyarakat untuk mengikuti prosedur formal perumusan kebijakan. Keterbatasan informasi menyebabkan partisipasi masyarakat terbatas dan ide-ide mereka kurang tersalurkan, sementara hambatan budaya menyulitkan pemahaman terhadap proses kebijakan. Selain itu, rendahnya kapasitas teknis membatasi kemampuan masyarakat untuk aktif dalam musyawarah atau memberikan masukan yang sesuai, sehingga secara keseluruhan partisipasi mereka dalam perumusan kebijakan menjadi kurang optimal.

**Tabel 4. Strategi dan Mekanisme Partisipasi Efektif Komunitas Adat di Merauke**

Strategi / Mekanisme	Bentuk Implementasi	Dampak terhadap Partisipasi dan Kebijakan	Contoh Observasi / Fakta Lapangan
Penggunaan Bahasa Lokal	Forum musyawarah desa menggunakan bahasa adat	Mempermudah pemahaman masyarakat, meningkatkan keterlibatan aktif	85% peserta musyawarah aktif memberikan masukan dalam bahasa lokal
Forum Konsultasi Rutin	Rapat konsultasi desa setiap bulan dengan keterlibatan tokoh adat	Membuka ruang dialog kontinu, memperkuat legitimasi kebijakan	Masyarakat rutin hadir dan memberikan rekomendasi sebelum kebijakan ditetapkan
Pelibatan Tokoh Adat sebagai Mediator	Tokoh adat memfasilitasi diskusi antara pemerintah dan masyarakat	Menjembatani konflik, menjaga kearifan lokal, meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan	Konflik terkait alokasi dana desa berhasil diminimalkan melalui mediasi tokoh adat
Mekanisme Kebijakan Adaptasi	Penyesuaian regulasi sesuai norma adat dan kondisi lokal	Kebijakan lebih relevan, keberlanjutan program terjamin	Pemerintah menyesuaikan jadwal kegiatan pembangunan dengan kalender adat setempat
Transparansi Informasi	Publikasi hasil musyawarah dan rencana kebijakan di papan desa dan media lokal	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah	90% warga menyatakan lebih paham dan siap terlibat dalam implementasi kebijakan

Tabel 4 menunjukkan berbagai strategi dan mekanisme yang efektif dalam meningkatkan partisipasi komunitas adat di Merauke. Penggunaan bahasa lokal dalam forum musyawarah desa mempermudah pemahaman dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sementara forum konsultasi rutin

memberikan ruang dialog berkelanjutan yang memperkuat legitimasi kebijakan. Pelibatan tokoh adat sebagai mediator membantu menjembatani konflik dan menjaga kepercayaan terhadap kebijakan, sedangkan mekanisme adaptasi kebijakan yang menyesuaikan regulasi dengan norma adat dan kondisi lokal memastikan relevansi serta keberlanjutan program. Selain itu, transparansi informasi melalui publikasi hasil musyawarah dan rencana kebijakan meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan akuntabilitas masyarakat terhadap proses kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan struktural di masing-masing desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota komunitas adat aktif dalam musyawarah desa dan forum konsultasi publik, terutama ketika isu yang dibahas berkaitan langsung dengan kepentingan mereka, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur lokal, dan program pemberdayaan masyarakat (Tambaip et al., 2024). Keaktifan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan keinginan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lokal. Faktor sosial, budaya, dan pendidikan menjadi determinan utama tingkat partisipasi masyarakat adat. Secara sosial, keterikatan antaranggota komunitas melalui jaringan kekerabatan dan norma gotong royong memperkuat kolaborasi dan motivasi untuk hadir dalam setiap forum musyawarah(Tjilen, Tambaip, et al., 2023). Dari sisi budaya, nilai-nilai kearifan lokal, termasuk prinsip musyawarah mufakat, memfasilitasi keterlibatan kolektif dan memperkuat legitimasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, faktor pendidikan dan pemahaman terhadap prosedur formal pemerintahan memengaruhi kemampuan individu untuk menyampaikan aspirasi secara efektif dan kritis, sehingga perbedaan tingkat pendidikan berimplikasi pada variasi kontribusi peserta dalam forum kebijakan publik.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat adat cukup tinggi, masih terdapat kendala berupa ketidakseimbangan informasi dan keterbatasan akses komunikasi. Beberapa anggota komunitas yang tinggal di lokasi terpencil kurang memperoleh informasi tentang agenda musyawarah atau prosedur pengambilan keputusan (Tjilen, Waas, et al., 2023). Hal ini menyebabkan sebagian kecil masyarakat mengalami keterbatasan dalam menyalurkan aspirasi mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan kebijakan publik. Penemuan ini sejalan dengan literatur governance di wilayah perbatasan yang menekankan bahwa akses informasi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif(Tambaip, Tjilen, Moento, et al., 2023). Lebih lanjut, temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi publik tidak hanya bergantung pada mekanisme formal yang disediakan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan karakteristik komunitas. Kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat adat di Merauke berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung keaktifan mereka, sekaligus sebagai filter budaya yang memastikan partisipasi tetap sesuai dengan norma dan nilai komunitas. Dengan demikian, interpretasi tingkat partisipasi masyarakat adat dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan governance yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, agar kebijakan publik dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Bentuk keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Merauke mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang khas, di mana tokoh adat dan lembaga adat memainkan peran sentral sebagai mediator dan fasilitator. Tokoh adat bertindak sebagai jembatan antara pemerintah lokal dan

masyarakat, menyampaikan aspirasi warga, menafsirkan regulasi dalam konteks budaya, serta memediasi konflik yang muncul selama proses perumusan kebijakan. Sementara itu, lembaga adat menyediakan struktur formal dan informal yang mendukung koordinasi, pengawasan, dan implementasi kebijakan, sehingga keterlibatan komunitas adat tidak sekadar simbolis, tetapi memiliki dampak nyata terhadap legitimasi dan keberlanjutan kebijakan publik(Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023b). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik partisipasi masyarakat adat di Merauke memiliki kesamaan prinsip dengan konsep governance inklusif yang dikemukakan dalam literatur partisipasi publik. Pemerintah lokal menyediakan mekanisme forum konsultasi, musyawarah desa, dan rapat evaluasi program, sementara komunitas adat memastikan aspirasi masyarakat dapat terwakili secara adil. Keterlibatan ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, tetap terdapat tantangan berupa perbedaan interpretasi antara norma adat dan prosedur formal pemerintah yang memerlukan mediasi terus-menerus dari tokoh adat (Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023a).

Kearifan lokal masyarakat adat, terutama prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat, menjadi pendorong utama efektivitas keterlibatan. Gotong royong mendorong kolaborasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, sementara musyawarah mufakat memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan yang diterapkan, karena keputusan yang diambil dianggap sesuai dengan nilai-nilai komunitas. Keterlibatan komunitas adat dalam implementasi kebijakan juga meliputi pemantauan dan evaluasi lokal(Tambaip & Tjilen, 2023). Tokoh adat dan lembaga adat berperan dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan lapangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Proses ini menekankan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga pengawal dan pengambil keputusan yang aktif dalam konteks lokal. Analisis bentuk keterlibatan komunitas adat di Merauke menunjukkan sinergi antara mekanisme formal pemerintah dan kearifan lokal masyarakat adat. Sinergi ini menjadi kunci dalam membangun governance yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model praktik partisipasi masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah perbatasan dan pedesaan lainnya.

Partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan publik di Merauke dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal mencakup kesadaran politik individu, pemahaman terhadap hak-hak masyarakat, serta kapasitas partisipatif dalam menyampaikan aspirasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota komunitas adat yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hak-hak mereka cenderung lebih aktif dalam forum musyawarah dan konsultasi publik. Kesadaran politik yang tinggi memotivasi warga untuk terlibat secara proaktif, sementara kapasitas partisipatif, termasuk kemampuan berkomunikasi dan memahami prosedur formal pemerintahan, menentukan seberapa efektif kontribusi mereka terhadap proses pengambilan keputusan. Selain faktor internal, faktor eksternal memainkan peran penting dalam mendorong atau membatasi partisipasi. Dukungan pemerintah lokal, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, akses informasi yang memadai, serta program pemberdayaan masyarakat terbukti menjadi pendorong utama keterlibatan(Riyanto et al., 2024). Misalnya, penyediaan forum konsultasi rutin dan informasi yang jelas tentang agenda kebijakan memfasilitasi partisipasi yang lebih inklusif. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi atau minimnya dukungan

pemerintah mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi terbatas, terutama bagi kelompok yang tinggal di lokasi terpencil.

Analisis temuan ini dapat dikaitkan dengan teori partisipasi publik yang membedakan tingkatan partisipasi dari manipulasi hingga pemberdayaan penuh (citizen power). Di Merauke, bentuk partisipasi masyarakat adat cenderung berada pada level konsultasi dan kolaborasi, di mana masyarakat memiliki peluang untuk memberi masukan dan berkontribusi pada pengambilan keputusan, meskipun belum sepenuhnya memiliki kontrol penuh atas kebijakan. Literatur modern tentang governance inklusif menekankan bahwa partisipasi yang efektif memerlukan kombinasi dukungan institusional, kapasitas masyarakat, serta keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan (Tambaip, Tjilen, & Ohiwutun, 2023b). Interaksi antara faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa kapasitas partisipatif masyarakat adat tidak cukup tanpa adanya dukungan struktural dari pemerintah dan lembaga adat. Keberhasilan partisipasi sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran politik dan pendidikan masyarakat dengan kebijakan yang responsif, transparansi, dan akses informasi yang memadai. Sinergi ini memungkinkan komunitas adat untuk tidak hanya hadir secara fisik dalam forum kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi bermakna yang memengaruhi kualitas dan legitimasi kebijakan publik. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adat di Merauke menunjukkan bahwa keterlibatan mereka adalah hasil interaksi kompleks antara modal sosial, kapasitas internal, dan kondisi eksternal yang mendukung. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan governance yang adaptif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal untuk memastikan partisipasi masyarakat adat yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun partisipasi masyarakat adat di Merauke cukup signifikan, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan yang membatasi keterlibatan mereka dalam proses kebijakan publik. Hambatan tersebut mencakup aspek budaya, bahasa, dan teknis. Perbedaan norma adat dan bahasa lokal dapat mempersulit komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sebagian aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara utuh. Secara teknis, keterbatasan akses informasi dan pemahaman terhadap prosedur formal musyawarah desa maupun forum konsultasi publik mengurangi efektivitas partisipasi (Tambaip et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan literatur governance di wilayah perbatasan dan desa terpencil, yang menekankan bahwa kendala budaya dan struktural menjadi faktor utama yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Implikasi dari hambatan tersebut cukup luas, karena dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dan legitimasi pemerintah lokal. Ketika aspirasi masyarakat tidak tercermin dalam kebijakan, risiko ketidakpuasan dan resistensi sosial meningkat. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas implementasi program pembangunan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, mengatasi hambatan partisipasi merupakan syarat penting agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke.

Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi dan praktik terbaik yang mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat adat. Forum musyawarah rutin yang disesuaikan dengan jadwal komunitas lokal, penggunaan bahasa lokal dalam proses konsultasi, dan peran aktif tokoh adat sebagai mediator terbukti meningkatkan partisipasi secara signifikan. Praktik-praktik ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara bermakna, sekaligus memastikan bahwa aspirasi mereka dihormati dan terakomodasi dalam kebijakan. Mekanisme adaptasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal menjadi kunci keberhasilan governance di Merauke. Pendekatan ini mencakup penyesuaian prosedur formal agar sesuai

dengan norma adat, peningkatan akses informasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan atau sosialisasi kebijakan. Strategi-strategi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi proses aktif yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan responsivitas kebijakan publik.

Dari perspektif teoretis, temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori partisipasi publik dan governance inklusif, khususnya di wilayah perbatasan dan pedesaan terpencil. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi tidak hanya bergantung pada mekanisme formal pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara modal sosial masyarakat, kearifan lokal, dan dukungan institusional. Temuan ini memperluas literatur tentang governance inklusif dengan memasukkan konteks kultural dan geografis yang unik. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah lokal, pembuat kebijakan, dan lembaga adat di Merauke. Mereka disarankan untuk terus memperkuat peran tokoh adat, meningkatkan akses informasi, dan menyediakan forum konsultasi yang inklusif. Keterlibatan komunitas adat yang optimal akan meningkatkan legitimasi kebijakan, efektivitas implementasi program pembangunan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat bukan sekadar tujuan normatif, tetapi instrumen strategis untuk mencapai governance yang efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat cukup bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal, terutama melalui forum musyawarah desa dan keterlibatan tokoh adat sebagai fasilitator. Hambatan utama yang mengurangi partisipasi meliputi keterbatasan akses informasi, perbedaan bahasa atau norma adat, serta kapasitas teknis masyarakat yang masih rendah. Strategi peningkatan partisipasi yang efektif mencakup penggunaan bahasa lokal dalam forum konsultasi, keterlibatan rutin tokoh adat, serta program edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas partisipasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan faktor kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan teori partisipasi masyarakat dalam governance di konteks lokal yang khas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benyei, P., Skarlatidou, A., Argyriou, D., Hall, R., Theilade, I., Turreira García, N., Latreche, D., Albert, A., Berger, D., & Cartró-Sabaté, M. (2023). *Challenges, strategies, and impacts of doing citizen science with marginalised and indigenous communities: reflections from project coordinators*.
- Clark, J. K. (2021). Public values and public participation: A case of collaborative governance of a planning process. *The American Review of Public Administration*, 51(3), 199–212.
- Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan

- Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5762–5773.
- Lee, J., & Lee, J. (2024). Compatibility of the incompatible: how does asymmetric power lead to coexistence of trust and distrust in adversarial policy networks? *International Journal of Public Administration*, 47(5), 297–312.
- Muhdiarta, U. (2025). The Role of Community Participation in Shaping Policies and Its Implications for Government Legitimacy. *The Journal of Academic Science*, 2(4), 1109–1117.
- Mulder, F. (2023). The paradox of externally driven localisation: a case study on how local actors manage the contradictory legitimacy requirements of top-down bottom-up aid. *Journal of International Humanitarian Action*, 8(1), 7.
- Riyanto, P., Humaid, H., Tambaip, B., Asmawi, M., & Lubis, J. (2024). Education and Welfare: The Role of Public Policy in Equalizing Educational Opportunities for the South Papua Generation. *KnE Social Sciences*, 574–588.
- Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). *Penguatan Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa*. 1(10), 1611–1619.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101–110.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., Moento, P. A., & Riyanto, P. (2023). MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK. *Nusantara Hasana Journal*, 2(12), 98–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2025). Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua. *Journal of Ecohumanism*, 4(2), 1117–1131.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Waas, R. F. Y., Moento, P. A., & Purnama, E. N. (2023). Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 257–262.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahruddin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
- Webler, T., & Tuler, S. (2021). Four decades of public participation in risk decision making. *Risk Analysis*, 41(3), 503–518.